

DINAMIKA PDB SEKTOR PERTANIAN DAN PENDAPATAN PETANI

Hermanto dan Gatoet S. Hardono

PENDAHULUAN

Sebagai negara berkembang yang padat penduduknya, Indonesia memerlukan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang relatif tinggi untuk meningkatkan pendapatan per kapita bagi penduduknya. Menurut teori makro, pertumbuhan PDB dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk investasi, pengeluaran pemerintah, net ekspor, dan konsumsi rumah tangga (Kusumawardhani *et al.*, 2012), sedangkan investasi dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi (Silvia *et al.*, 2013).

Di era globalisasi ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan pertumbuhan ekonomi global. Menurut Sihono (2009), ekonomi Indonesia akan tetap tumbuh di atas 6% karena dukungan ekonomi Cina dan India, tetapi akan mengalami perlambatan akibat gejolak ekonomi global yang dipengaruhi oleh melemahnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat. Raz *et al.* (2012) menyatakan bahwa dampak negatif krisis keuangan global tahun 2008 terhadap perekonomian Asia Timur, termasuk Indonesia, lebih kecil bila dibandingkan dengan krisis keuangan pada tahun 1997 karena perekonomian Indonesia telah mengambil pelajaran setelah krisis tahun 1997 dengan memperkuat fundamental ekonomi, dukungan kredibilitas, dan akuntabilitas pemerintah yang lebih baik.

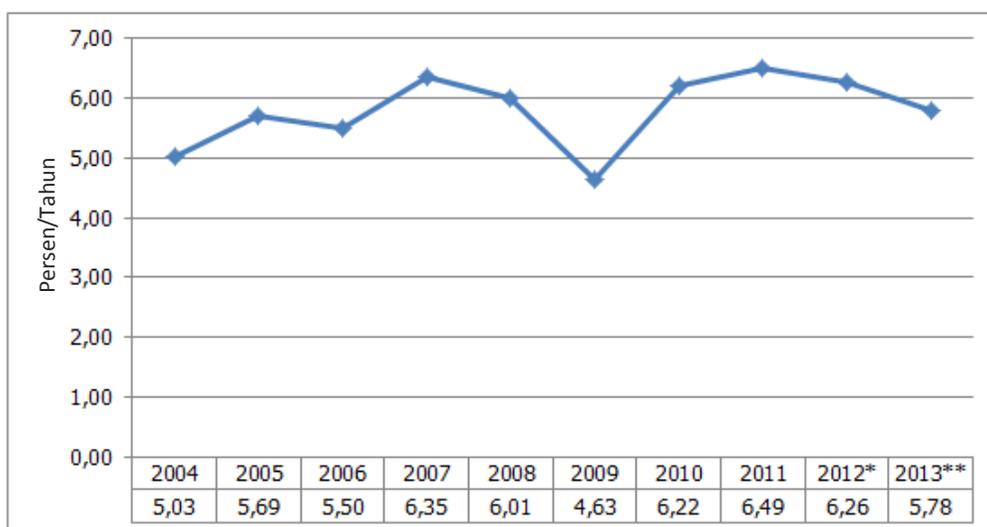
Sektor pertanian selama ini merupakan sektor penyumbang PDB yang cukup besar, namun perannya semakin menurun karena pertumbuhan di sektor nonpertanian yang relatif lebih cepat dari pertumbuhan sektor pertanian. Pada tahun 2014 sumbangan sektor pertanian terhadap PDB adalah sekitar 13,38% (sama dengan sumbangan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor) (BPS, 2015a).

Sektor pertanian juga merupakan sektor yang dominan dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia, walaupun perannya juga cenderung menurun. Pada tahun 2004 peran sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja sekitar 45%, menurun menjadi 34% pada tahun 2014 (BPS, 2015b). Walaupun demikian, sektor pertanian masih merupakan sektor terbesar dalam menyerap tenaga kerja pada tahun 2014.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perubahan sumbangan sektor pertanian terhadap PDB, serta dinamika pendapatan per kapita di sektor pertanian pada tingkat nasional dan wilayah. Tulisan ini juga bertujuan untuk menganalisis perubahan distribusi pendapatan per kapita menurut wilayah. Data yang digunakan dalam analisis adalah data sekunder yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik.

KERAGAAN EKONOMI NASIONAL 2004–2013

Secara umum perekonomian nasional selama periode 2004–2013 tumbuh dengan laju pertumbuhan dari kuartal ke kuartal (Q to Q) rata-rata 5,80%. Laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) tertinggi terjadi pada tahun 2011, yaitu 6,49%. Adapun laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009, yaitu 4,63%. Penurunan laju pertumbuhan PDB dari 6,01% pada tahun 2008, menjadi 4,63% pada tahun 2009 mengindikasikan terjadinya pengaruh krisis perekonomian global yang terjadi pada tahun 2008 terhadap laju pertumbuhan perekonomian nasional. Namun demikian, dampak dari krisis perekonomian global terhadap perekonomian nasional tidak terjadi secara berkepanjangan. Perekonomian nasional segera “bangkit” dan pada tahun 2010 laju pertumbuhan PDB sudah pulih mencapai 6,22% (Gambar 1).



Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: *Angka sementara

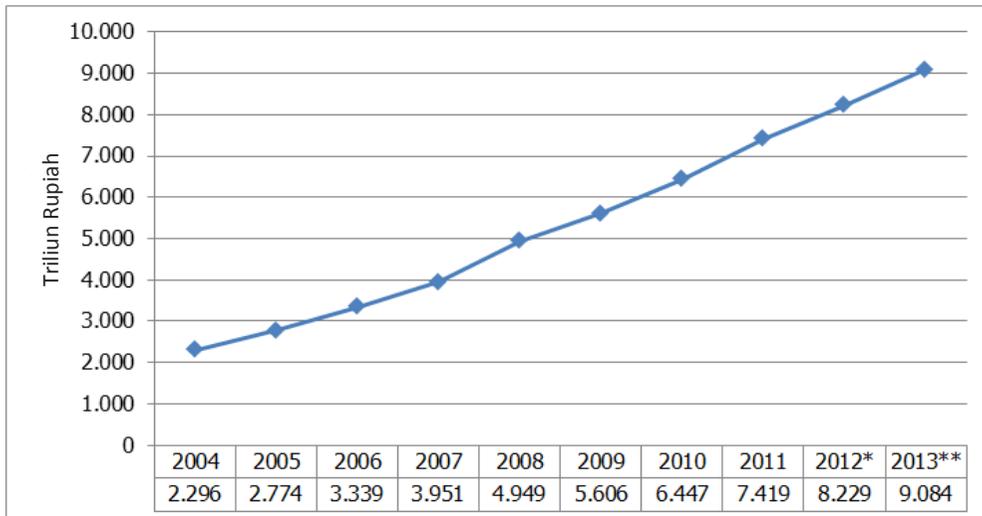
**Angka sangat sementara

Gambar 1. Laju Pertumbuhan PDB (Q to Q), 2004–2013

Nilai PDB atas harga berlaku pada tahun 2004 adalah sekitar 2.295,8 triliun rupiah, meningkat menjadi 9.084,0 triliun rupiah pada tahun 2013. Dengan demikian, selama periode 2004–2014 nilai PDB nasional atas harga berlaku naik sebesar 3,96 kali (Gambar 2). Dengan kinerja tersebut pada tahun 2012 Indonesia dinilai dari besaran PDB-nya masuk dalam peringkat ke-16 dari 177 negara, dan dari laju pertumbuhan ekonominya masuk dalam peringkat ke-38 dari 179 negara.

Pertumbuhan ekonomi yang mencapai di atas 6% yang terjadi tiga tahun secara berturut-turut, yaitu pada tahun 2010, 2011, dan 2012, tidak bertahan lama. Pertumbuhan PDB kemudian melemah menjadi 5,78% pada tahun 2013.

Melemahnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2013 terkait dengan terjadinya defisit neraca berjalan pada kuartal III.



Sumber: BPS (2014), diolah

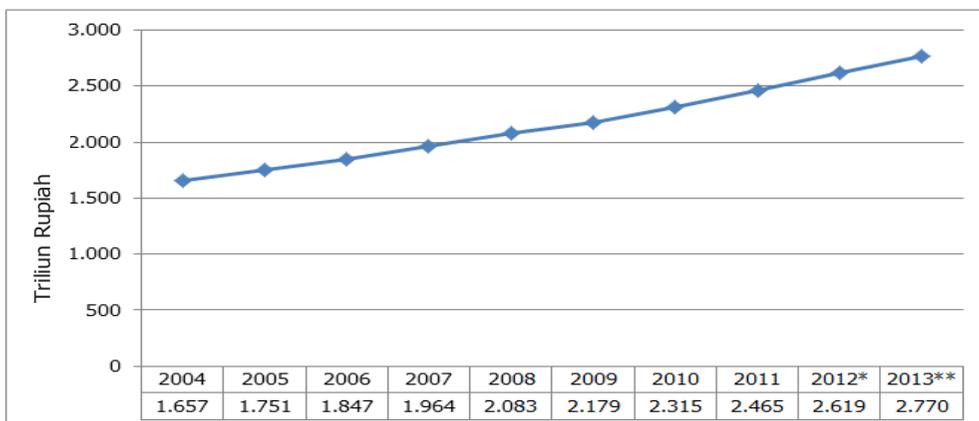
Keterangan: *Angka sementara

**Angka sangat sementara

Gambar 2. PDB Atas Harga Berlaku, 2004–2013

Jika pertumbuhan PDB dianalisis berdasarkan atas harga konstan tahun 2000, terlihat bahwa pertumbuhan PDB nasional pada periode tahun 2004–2013 tidak menggambarkan laju pertumbuhan setinggi laju pertumbuhan PDB atas harga berlaku. Data menunjukkan bahwa PDB tahun 2004 yang diukur atas dasar harga konstan tahun 2000 adalah sekitar 1.656,5 triliun rupiah. Sementara itu, nilai PDB pada tahun 2013 atas harga konstan tahun 2000 adalah 2.770,3 triliun rupiah.

Dengan menggunakan perhitungan PDB atas harga konstan tahun 2000, dapat dikatakan bahwa PDB tahun 2013 tumbuh 1,67 kali dibandingkan PDB tahun 2004 (Gambar 3). Perubahan nilai PDB atas harga konstan tahun 2000 tersebut hanya sekitar 0,42 kali dibanding dengan perubahan nilai PDB atas harga berlaku pada periode yang sama, yaitu 3,96 kali. Keadaan ini mengindikasikan bahwa volume barang dan jasa yang secara agregat dihasilkan selama periode tahun 2004–2013 hanya naik sebesar 1,67 kali, sedangkan pertumbuhan PDB selama periode tersebut sebagian besar, yaitu 2,28 (3,96 dikurangi 1,67) kali disebabkan oleh kenaikan harga barang dan jasa. Hal ini juga mengindikasikan bahwa angka inflasi nilai rupiah selama periode 2004–2013 cukup besar, sehingga daya beli masyarakat secara riil sebenarnya tidak naik sebesar pertumbuhan PDB atas harga berlaku.



Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: *Angka sementara

**Angka sangat sementara

Gambar 3. PDB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000, 2004–2013

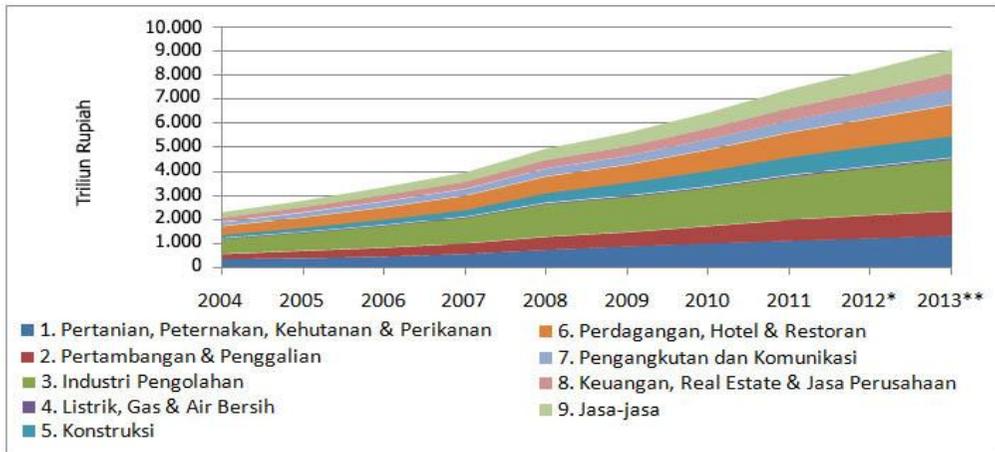
PERAN SEKTOR PERTANIAN DALAM PEREKONOMIAN NASIONAL

Sektor pertanian dalam arti luas (termasuk subsektor tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan, dan perikanan) merupakan salah satu sektor penting sebagai sumber pendapatan bagi sebagian besar rakyat Indonesia. Sektor pertanian dalam arti luas menyerap lebih dari 35% angkatan kerja. Di samping itu, sektor pertanian dalam arti luas juga merupakan penghasil bahan baku bagi sektor industri, selain juga sebagai pengguna input yang dihasilkan oleh sektor industri, serta pengguna dari sektor jasa angkutan dan perdagangan.

Data menunjukkan bahwa selama periode tahun 2004–2013 sektor pertanian dalam arti luas masih memegang peran strategis dalam menciptakan pendapatan bagi perekonomian nasional. Nilai PDB masing-masing sektor atas harga berlaku selama periode tahun 2004–2013 tercantum dalam Gambar 4. Pada tahun 2004 PDB sektor pertanian dalam arti luas adalah Rp329,12 triliun, naik menjadi Rp1.311,30 triliun pada tahun 2013, atau naik sebesar 3,98 kali lipat. Sebagai perbandingan, PDB sektor konstruksi adalah Rp151,25 triliun, naik menjadi Rp907,27 triliun pada tahun 2013, atau naik 6 kali lipat. Demikian halnya dengan PDB sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2004 adalah Rp205,25 triliun, naik menjadi Rp1.020,77 triliun pada tahun 2013, atau naik sebesar 4,97 kali lipat.

Sementara itu, PDB atas dasar harga berlaku untuk sektor industri pengolahan pada tahun 2004 adalah Rp644,34 triliun, naik menjadi Rp2.152,59 triliun, atau naik sebesar 3,34 kali lipat. Adapun PDB atas dasar harga berlaku untuk sektor perdagangan, hotel, dan restoran pada tahun 2004 adalah sebesar Rp368,56 triliun, naik menjadi Rp1.301,51 triliun, atau naik sebesar 3,53 kali lipat. Kondisi demikian menunjukkan bahwa perkembangan sektor industri dan jasa perdagangan yang diharapkan dapat dijadikan motor penggerak ekonomi, setelah menurunnya

peran sektor pertanian dalam arti luas, tidak dapat direalisasikan dalam periode tahun 2004–2013 ini.



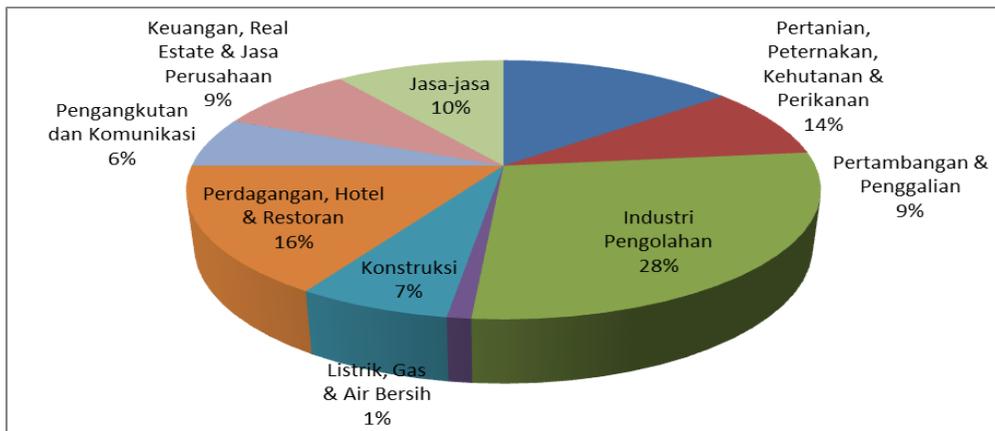
Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: *Angka sementara

**Angka sangat sementara

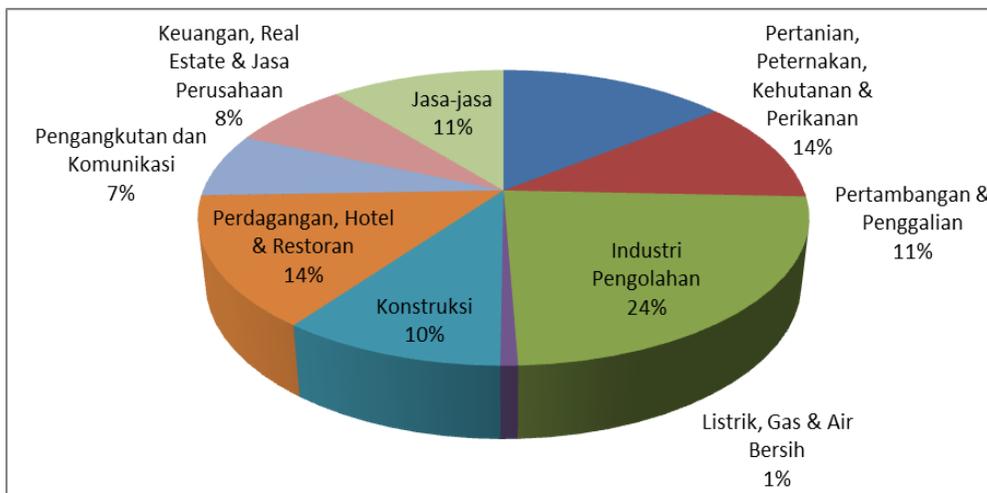
Gambar 4. PDB Atas Harga Berlaku Menurut Sektor, 2004–2013

Perubahan nilai PDB pada masing-masing sektor pada periode tahun 2004–2013 mengubah komposisi sumbangan masing-masing sektor dalam PDB nasional. Gambar 5 dan Gambar 6 menunjukkan perubahan komposisi sumbangan masing-masing sektor terhadap PDB atas dasar harga berlaku untuk tahun 2004 dan 2013. Pada tahun 2004, sektor pertanian dalam arti luas menyumbang sekitar 14% dari total PDB nasional. Peran sektor pertanian terhadap PDB nasional tidak mengalami perubahan yang nyata, sehingga sumbangan sektor ini pada tahun 2013 masih tetap, yaitu 14%.



Sumber: BPS (2014), diolah

Gambar 5. Sumbangan Masing-Masing Sektor terhadap PDB Atas Harga Berlaku, 2004



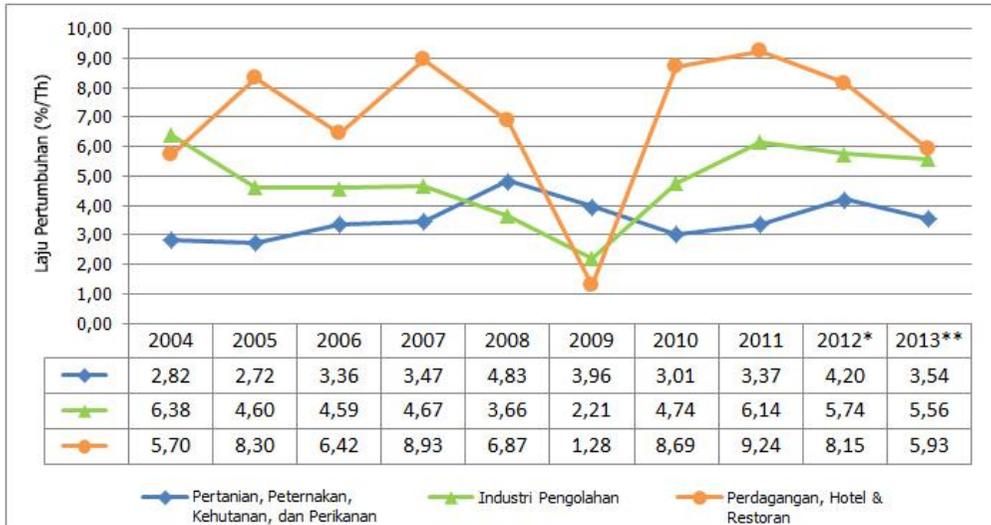
Sumber: BPS (2014), diolah

Gambar 6. Sumbangan Masing-Masing Sektor terhadap PDB Atas Harga Berlaku, 2013

Sektor-sektor yang mengalami peningkatan sumbangannya terhadap PDB nasional adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, sektor pengangkutan dan komunikasi, dan sektor jasa-jasa. Adapun sektor-sektor yang mengalami penurunan sumbangannya terhadap PDB nasional adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor keuangan, real estate, dan jasa perusahaan.

Gambar 7 menunjukkan perbandingan laju pertumbuhan kuartal ke kuartal untuk sektor pertanian dalam arti luas, sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran dalam periode tahun 2004–2013. Selama periode tahun 2004–2013, sektor pertanian dalam arti luas tumbuh relatif stabil dengan laju pertumbuhan rata-rata 3,53%. Laju pertumbuhan tertinggi sebesar 4,83% terjadi pada tahun 2008, yaitu pada saat terjadi krisis ekonomi dunia, kemudian turun menjadi 3,96% pada tahun 2009 dan menjadi 3,01% pada tahun 2010. Laju pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas meningkat kembali menjadi 3,37% pada tahun 2011 dan menjadi 4,20% pada tahun 2012, tetapi kemudian turun kembali menjadi 3,54% pada tahun 2013.

Pertumbuhan sektor industri pengolahan selama periode 2004–2013 menunjukkan adanya fluktuasi yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pertanian dalam arti luas. Sektor industri pengolahan tumbuh dengan laju pertumbuhan rata-rata 4,83%, dengan laju pertumbuhan terendah sebesar 2,21% pada tahun 2009, yaitu satu tahun setelah krisis, sedangkan pertumbuhan tertinggi sebesar 6,38% pada tahun 2004. Sebagaimana yang terjadi pada sektor lainnya, setelah tahun 2009, laju pertumbuhan sektor ini cenderung meningkat kembali.



Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: *Angka sementara

**Angka sangat sementara

Gambar 7. Laju Pertumbuhan PDB (Q to Q) Sektor Pertanian, Industri Pengolahan, dan Perdagangan, 2004–2013

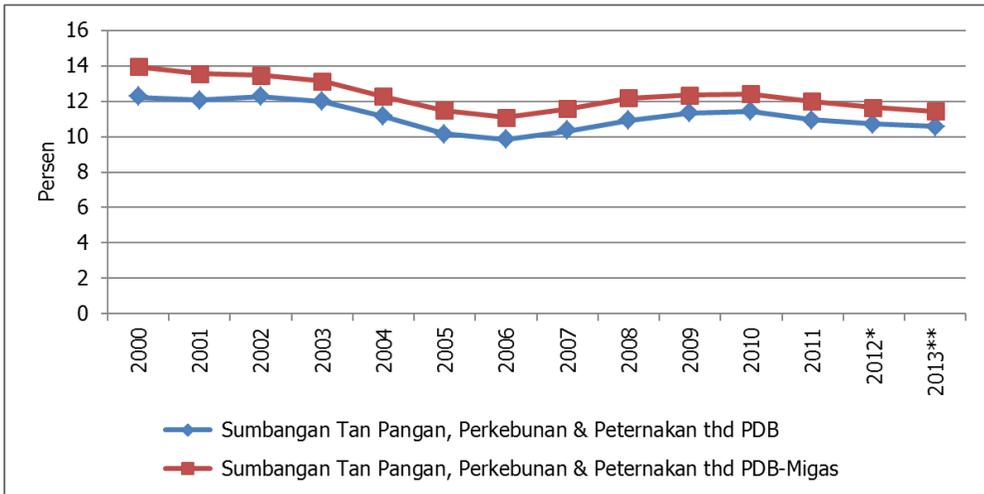
Pertumbuhan di sektor perdagangan, hotel, dan restoran selama periode tahun 2004–2013 menunjukkan pola fluktuasi yang tertinggi dibandingkan dengan pertumbuhan di sektor pertanian dalam arti luas, dan pertumbuhan di sektor industri pengolahan. Selama periode ini, sektor perdagangan, hotel dan restoran tumbuh dengan laju pertumbuhan rata-rata 6,95%. Pertumbuhan tertinggi sebesar 9,24% terjadi pada tahun 2011, yaitu tiga tahun setelah terjadinya krisis ekonomi global tahun 2008. Pertumbuhan terendah sebesar 1,28% per tahun terjadi pada tahun 2009, yaitu satu tahun setelah terjadinya krisis ekonomi global.

PERAN SUBSEKTOR TANAMAN BAHAN MAKANAN, PERKEBUNAN, DAN PETERNAKAN DALAM SEKTOR PERTANIAN

Pada tahun 2000 sumbangan sektor pertanian dalam arti sempit (subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan) terhadap PDB adalah sekitar 12,24%, dan sumbangannya terhadap PDB tanpa migas adalah 13,96%. Sumbangan sektor pertanian terhadap PDB cenderung menurun selama periode tahun 2000–2013 (Gambar 8). Pada tahun 2013 sumbangan sektor pertanian terhadap PDB turun menjadi 10,59% dan sumbangan sektor pertanian terhadap PDB tanpa migas menjadi 11,43%.

Menurunnya sumbangan sektor pertanian dalam arti sempit terhadap PDB mengindikasikan bahwa sudah terjadi proses transformasi perekonomian nasional, yang tadinya lebih didominasi oleh nilai komoditas primer hasil produksi sektor

pertanian dalam arti sempit, bergeser ke arah dominasi sektor dan atau subsektor lainnya. Semakin mengecilnya selisih sumbangan sektor pertanian dalam arti sempit terhadap PDB tanpa migas dengan sumbangan sektor pertanian dalam arti sempit terhadap PDB menunjukkan bahwa dominasi migas dalam perekonomian nasional juga relatif menurun.



Sumber: BPS (2014), diolah
 Keterangan: *Angka sementara
 **Angka sangat sementara

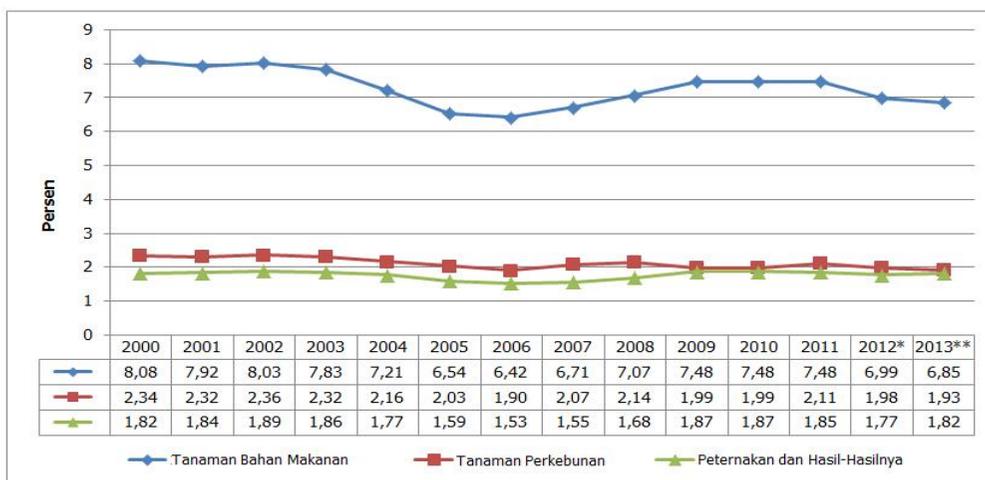
Gambar 8. Sumbangan Subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan terhadap PDB, 2000–2013

Sumbangan masing-masing subsektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, dan peternakan terhadap PDB nasional atas harga berlaku selama periode tahun 2000–2013 dapat dilihat pada Gambar 9. Pada tahun 2000 sumbangan subsektor tanaman bahan makanan terhadap PDB masih sekitar 8,08%. Sumbangan subsektor tanaman bahan makanan cenderung menurun sehingga menjadi 6,85% pada tahun 2013. Sumbangan subsektor ini pada saat pascakrisis ekonomi global tahun 2008 ternyata masih cukup tinggi, yaitu di atas 7% pada tahun 2009 hingga tahun 2011.

Sumbangan subsektor tanaman perkebunan terhadap PDB pada tahun 2000 masih sekitar 2,34%. Sumbangan subsektor ini terhadap PDB mengalami kecenderungan menurun, hingga pada tahun 2013 menjadi 1,93%. Dilihat dari pola perkembangan sumbangan subsektor tanaman perkebunan terhadap PDB selama periode tahun 2000–2013, tidak terlihat secara nyata adanya dampak krisis ekonomi global tahun 2008.

Selama periode tahun 2000–2013 tidak terlihat adanya penurunan sumbangan dari subsektor peternakan terhadap PDB nasional. Pada tahun 2000 sumbangan subsektor peternakan terhadap PDB nasional sekitar 1,82%. Pada tahun 2013 sumbangan subsektor ini masih tetap sekitar 1,83%. Ada kemiripan pola

perubahan sumbangannya terhadap PDB dari tahun ke tahun antara subsektor tanaman perkebunan dengan subsektor peternakan.



Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: *Angka sementara

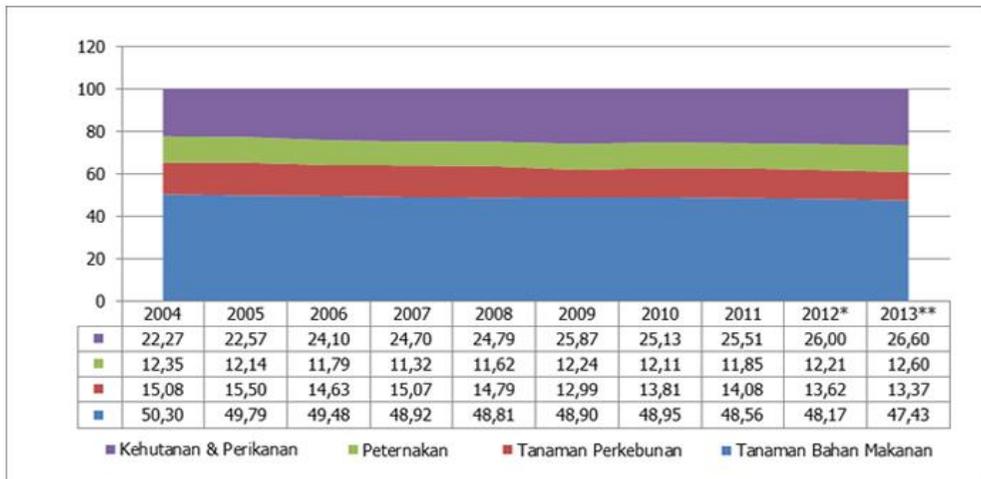
**Angka sangat sementara

Gambar 9. Sumbangan Masing-Masing Subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan terhadap PDB, 2000–2013

Perkembangan sumbangan subsektor tanaman bahan makanan, subsektor tanaman perkebunan, subsektor peternakan, dan gabungan subsektor kehutanan dan perikanan terhadap PDB sektor pertanian dalam arti luas selama periode tahun 2004–2013 dapat dilihat pada Gambar 10. Sumbangan subsektor tanaman bahan makanan pada tahun 2004 adalah 50,30%, turun menjadi 47,43% pada tahun 2013. Sumbangan subsektor tanaman perkebunan juga mengalami penurunan dari 15,08% pada tahun 2004, menjadi 13,37% pada tahun 2013. Sementara itu, sumbangan subsektor peternakan dapat dikatakan stabil, yaitu sebesar 12,35% pada tahun 2004, menjadi 12,60% pada tahun 2013. Adapun sumbangan dari gabungan subsektor kehutanan dan perikanan cenderung meningkat dari 22,27% pada tahun 2004, menjadi 26,60% pada tahun 2013.

Nilai PDB subsektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, dan peternakan selama periode tahun 2004–2013 dapat dilihat pada Gambar 11. Sebagai subsektor terbesar dalam kelompok ini, nilai PDB atas dasar harga berlaku untuk subsektor tanaman bahan makanan pada tahun 2004 adalah Rp165,56 triliun, naik menjadi Rp621,83 triliun pada tahun 2013, atau naik sebesar 3,76 kali lipat. Nilai PDB atas dasar harga berlaku untuk subsektor tanaman perkebunan pada tahun 2004 adalah Rp49,63 triliun, naik menjadi Rp175,25 triliun pada tahun 2013, atau naik sebesar 3,53 kali lipat. Sementara itu, nilai PDB atas dasar harga berlaku untuk subsektor peternakan pada tahun 2004 adalah Rp40,63 triliun, naik menjadi Rp165,16 triliun pada tahun 2013, atau naik sebesar 4,06 kali lipat. Pertumbuhan PDB dari kuartal ke kuartal selama periode tahun 2004–2013 untuk subsektor tanaman bahan makanan, tanaman perkebunan, dan peternakan dapat dilihat pada

Gambar 12. PDB subsektor tanaman bahan makanan selama periode tahun 2004–2013 tumbuh dengan laju pertumbuhan rata-rata 3,13%. Pertumbuhan terendah, yaitu sebesar 1,64% terjadi pada tahun 2010, dan pertumbuhan tertinggi adalah 6,06% terjadi pada tahun 2008. Dari grafik pola pertumbuhan dapat dilihat bahwa subsektor tanaman bahan makanan mendapatkan dampak negatif dari krisis ekonomi global selama dua tahun setelah krisis. Pertumbuhan subsektor ini baru menunjukkan gejala pemulihan setelah tahun 2011.



Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: *Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara

Gambar 10. Sumbangan Subsektor Tanaman Pangan, Tanaman Perkebunan, dan Peternakan terhadap PDB Sektor Pertanian dalam Arti Luas, 2004–2013



Sumber: BPS (2014), diolah

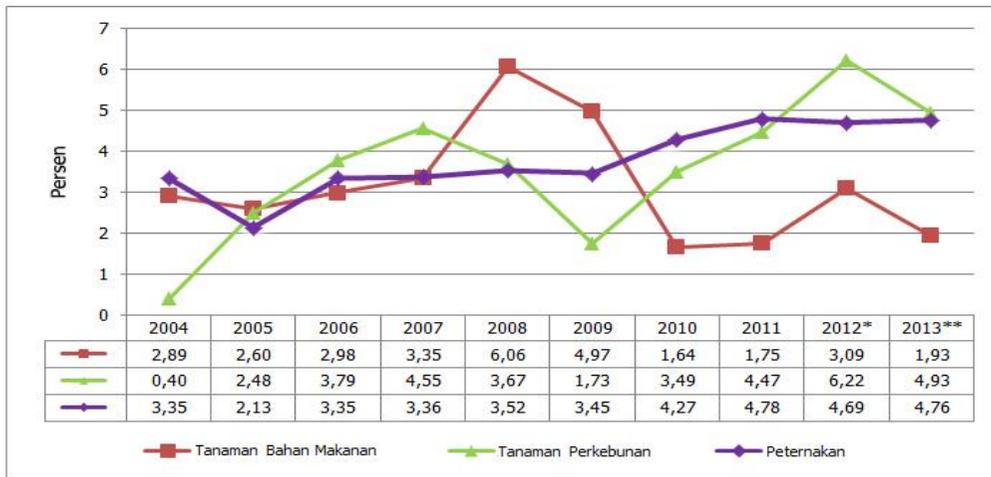
Keterangan: *Angka sementara

**Angka sangat sementara

Gambar 11. PDB Subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan, 2004–2013

Subsektor tanaman perkebunan selama periode 2004–2013 tumbuh dengan laju pertumbuhan kuartal ke kuartal rata-rata sebesar 3,57%. Pertumbuhan terendah sebesar 0,40 terjadi pada tahun 2004, sedangkan pertumbuhan tertinggi sebesar 6,22% terjadi pada tahun 2012. Pola pertumbuhan tanaman perkebunan juga menunjukkan adanya dampak negatif dari krisis perekonomian global tahun 2008. Pertumbuhan subsektor tanaman perkebunan cenderung turun dari tahun 2007 sebesar 4,55%, menjadi 1,73% pada tahun 2009. Namun, pertumbuhan subsektor ini cenderung meningkat lagi setelah tahun 2009 hingga mencapai puncaknya sebesar 6,22% pada tahun 2012 (Gambar 12).

Dibanding dengan subsektor tanaman bahan pangan dan subsektor tanaman perkebunan, pertumbuhan dari kuartal ke kuartal untuk subsektor peternakan menunjukkan pola yang paling stabil. Selama periode tahun 2004–2013, subsektor peternakan tumbuh dengan laju rata-rata 3,67%. Pertumbuhan terendah sebesar 2,13% terjadi pada tahun 2005, dan pertumbuhan tertinggi sebesar 4,78% terjadi pada tahun 2011. Tidak terlihat secara nyata dampak negatif dari krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 terhadap laju pertumbuhan subsektor peternakan.



Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: *Angka sementara

**Angka sangat Sementara

Gambar 12. Laju Pertumbuhan (Q to Q) PDB Subsektor Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan, 2004–2013

DISTRIBUSI PENDAPATAN NASIONAL

Di samping pertumbuhan PDB, alat ukur yang sering dipakai untuk mengukur tingkat perkembangan ekonomi suatu negara atau daerah adalah distribusi pendapatan per kapita. Ketimpangan distribusi pendapatan di suatu daerah dapat

diukur dengan indeks Gini. Nilai indeks Gini yang rendah menunjukkan kecilnya ketimpangan pendapatan di suatu daerah, dan sebaliknya, nilai indeks Gini yang tinggi di suatu daerah menunjukkan adanya ketimpangan pendapatan yang tinggi. Sesuai dengan data yang tersedia di Badan Pusat Statistik (BPS), pendapatan per kapita didekati dengan pengeluaran per kapita. Tabel 1 menunjukkan nilai indeks Gini yang semakin besar, khususnya selama periode 2009–2013, yang menunjukkan semakin senjangnya distribusi pendapatan di Indonesia.

Gambar 13 menunjukkan keadaan indeks Gini per provinsi se-Indonesia pada tahun 2007, diurut dari yang rasio terkecil sampai yang terbesar. Indeks Gini yang terkecil terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 0,259, sedangkan indeks Gini tertinggi terdapat di Provinsi Papua sebesar 0,412. Adapun indeks Gini rata-rata untuk Indonesia adalah 0,364. Lima provinsi dengan nilai indeks Gini yang terendah, secara berturut-turut adalah Kepulauan Riau, Aceh, Kalimantan Tengah, Papua Barat, dan Kepulauan Riau. Lima provinsi dengan nilai indeks Gini terbesar berturut-turut adalah DI Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Lampung, dan Papua.

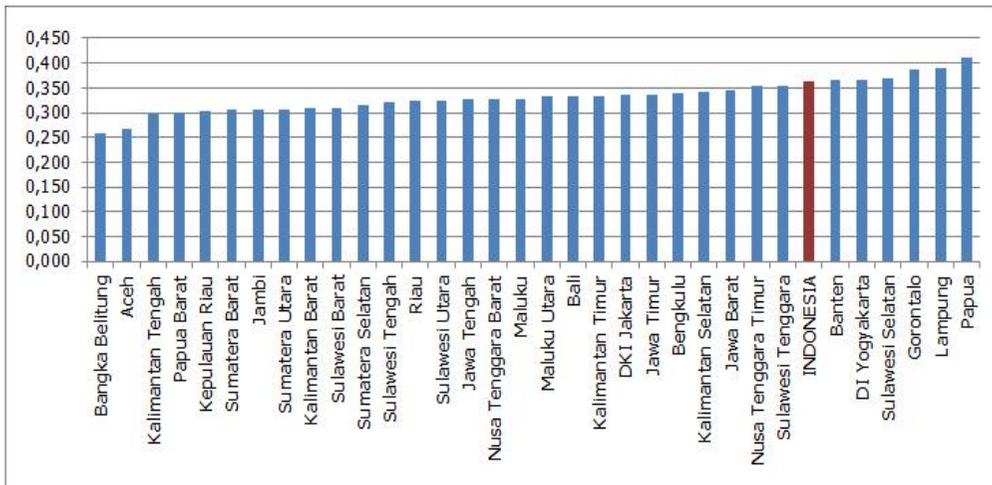
Tabel 1. Dinamika Pendapatan Nasional per Kapita dan Indeks Gini, 2003–2013

Tahun	Pendapatan (Rp juta/kap/thn)		Indeks Gini
	Harga Berlaku	Harga Konstan	
2003	6,17	6,17	0,329
2004	7,02	6,08	
2005	7,54	6,19	0,363
2006	8,11	6,26	
2007	9,19	6,61	0,364
2008	11,01	6,85	0,350
2009	13,01	7,03	0,370
2010	15,22	7,39	0,380
2011	19,09	7,93	0,410
2012	20,94	7,99	0,410
2013	23,97	8,49	0,413
Pertumbuhan (%/thn)			
2003–2008	18,75	4,86	1,13
2009–2013	11,26	4,36	3,41

Sumber: BPS (2014), diolah

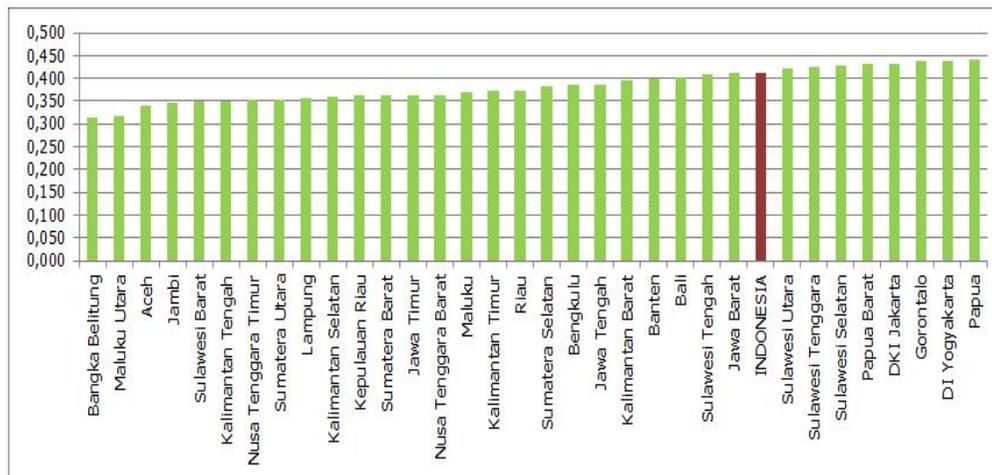
Gambar 14. menunjukkan gambaran indeks Gini per provinsi se-Indonesia pada tahun 2013. Data diurut dari rasio terkecil sampai rasio yang terbesar. Seperti yang terjadi pada tahun 2007, indeks Gini terkecil terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nilai 0,313 atau naik 20,85% dari nilai tahun 2007. Demikian halnya dengan Provinsi Papua yang mempunyai indeks Gini terbesar di

Indonesia pada tahun 2007, tetap menjadi provinsi dengan indeks Gini terbesar pada tahun 2013 dengan nilai 0,442%, atau naik 7,28% dari nilai tahun 2007.



Sumber: BPS (2014), diolah

Gambar 13. Indeks Gini Pengeluaran per Provinsi, 2007



Sumber: BPS (2014), diolah

Gambar 14. Indeks Gini Pengeluaran per Provinsi, 2013

Rata-rata indeks Gini pada tahun 2013 untuk Indonesia adalah 0,413, atau naik 13,46% dari nilai pada tahun 2007. Dari Gambar 14 juga dapat diketahui bahwa lima provinsi dengan indeks Gini terendah berturut-turut adalah Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara, Aceh, Jambi, dan Sulawesi Barat. Lima provinsi dengan indeks Gini tertinggi berturut-turut adalah Papua Barat, DKI Jakarta, Gorontalo, DI Yogyakarta, dan Papua.

Dengan membandingkan Gambar 13 terhadap Gambar 14, dapat diketahui bahwa ada provinsi yang tetap pada posisi lima terendah dan lima tertinggi indeks Gininya. Dua provinsi yang tetap pada posisi lima terendah indeks Gininya adalah Kepulauan Bangka Belitung dan Aceh. Adapun tiga provinsi yang tetap pada posisi lima terbesar indeks Gininya adalah DI Yogyakarta, Gorontalo, dan Papua. Provinsi yang melonjak nilai indeks Gininya adalah Papua Barat, yang pada tahun 2007 masih berada di posisi lima indeks Gini yang terendah, menjadi lima indeks Gini tertinggi pada tahun 2013.

DINAMIKA PDRB MENURUT WILAYAH SE-INDONESIA

Di tingkat regional penggunaan PDB sebagai indikator perekonomian disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Nilai-nilai dalam PDRB menggambarkan kinerja perekonomian makro di tingkat regional pada periode tertentu. Adanya faktor perbedaan kondisi perekonomian dan penguasaan sumber daya antardaerah menyebabkan struktur PDRB menjadi bervariasi antardaerah.

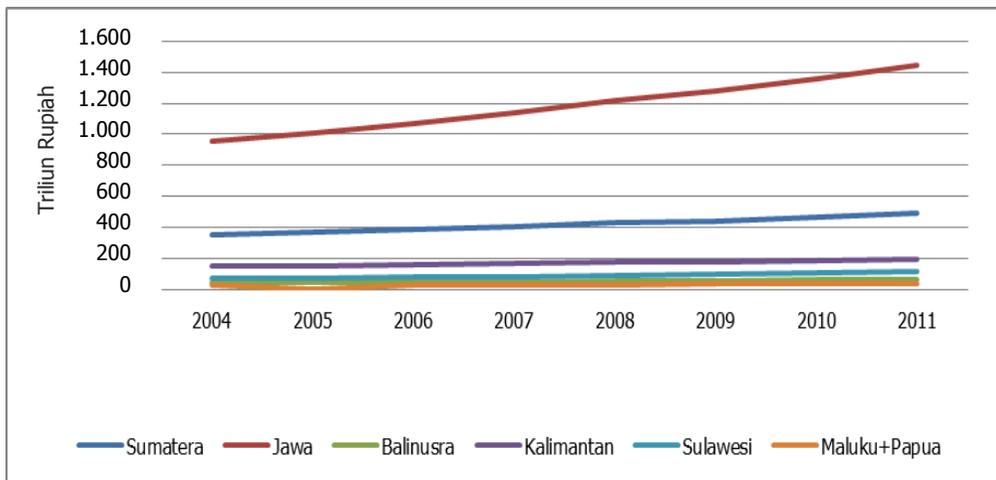
Dalam rangka percepatan dan perluasan pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional, pemerintah telah menyusun arahan strategis yang tersusun dalam suatu dokumen masterplan yang disebut Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). MP3EI ditetapkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32 Tahun 2011 dan berlaku untuk periode pembangunan 2011–2025. Terdapat enam koridor ekonomi dalam MP3EI, yaitu Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2010).

Koridor ekonomi Sumatera sebagai pusat pembangunan pengolahan hasil bumi dan sumber energi nasional. Koridor Jawa untuk mendorong industri dan jasa nasional. Koridor Kalimantan untuk pusat pengolahan hasil bumi dan hasil tambang nasional. Koridor Sulawesi untuk pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional. Koridor Bali dan Nusa Tenggara untuk pintu gerbang pariwisata dan pendukung pangan nasional, dan Koridor Maluku dan Papua untuk pengembangan pangan perikanan, energi, dan pertambangan nasional.

Sebagaimana yang berlaku pada PDB, pertumbuhan PDRB juga menunjukkan besarnya pertumbuhan perekonomian regional/wilayah untuk periode pembangunan tertentu. Dari Gambar 15 terlihat bahwa selama periode 2004–2011 pembangunan di Jawa lebih maju sehingga tingkat perekonomian masyarakatnya lebih baik dibandingkan wilayah lain di luar Jawa (Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan terlebih Papua). Hal ini terlihat dari akumulasi nilai PDRB di provinsi-provinsi di Jawa yang lebih tinggi dibanding di wilayah luar Jawa (Gambar 15). Secara akumulatif nilai PDRB di Jawa meningkat dari Rp957,6 triliun menjadi Rp1.446,8 triliun pada periode di atas, atau tumbuh dengan laju 5,9%/tahun. Di wilayah lain pencapaian PDRB tidak lebih dari Rp600 triliun, terlebih di Maluku dan Papua.

Perbedaan nilai PDRB yang terlalu jauh mengesankan ketimpangan ekonomi yang cukup besar antara provinsi-provinsi di Jawa dengan provinsi lain di luar Jawa, khususnya Kawasan Timur Indonesia. Indikasi ketimpangan ekonomi antarprovinsi sebelumnya juga dikemukakan oleh Kasryno dan Soeparno (2012) pada analisis terkait perspektif kebijakan MP3EI. Menurut Firdaus (2013) ketimpangan pembangunan adalah masalah historis yang dialami setiap negara. Dengan pola perkembangan PDRB seperti pada Gambar 15 dapat dikatakan bahwa pembangunan ekonomi di luar Jawa, khususnya di Kawasan Timur Indonesia, perlu lebih diintensifkan agar ketimpangan dapat segera dikurangi.

Perubahan secara temporal besaran dan laju PDRB penting diketahui para pengambil kebijakan pembangunan di daerah. Hal ini karena data PDRB juga dapat memberikan informasi gambaran pencapaian hasil pembangunan di wilayahnya. Tabel 2–Tabel 4 memperlihatkan bagaimana variasi perkembangan PDRB di 33 provinsi di Indonesia. Dapat disimak bahwa kecuali Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), seluruh provinsi memiliki PDRB yang berkembang dengan laju positif. Hal ini mengisyaratkan bahwa pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu analisis (2004–2011) masih meningkatkan kinerja perekonomian masyarakat. Perkembangan PDRB dengan laju negatif hanya terdapat di Provinsi NAD. Laju negatif disebabkan terjadi penurunan nilai PDRB tahun 2005–2011 dibanding nilai PDRB tahun 2004. Pada tahun 2004 nilai PDRB terbesar terdapat di Provinsi DKI Jaya (Rp278.525 miliar) diikuti Provinsi Jawa Timur (Rp242.228,9 miliar) dan Jawa Barat (Rp230.003 miliar), sedangkan nilai PRDB terendah adalah di Provinsi Gorontalo (Rp1.891,7 miliar).



Sumber: BPS (2014), diolah

Gambar 15. Perkembangan PDRB Menurut Wilayah, 2004–2011

Untuk tahun 2011 prestasi PDRB terbesar masih dipegang oleh Provinsi DKI Jaya (Rp422.162 miliar). Urutan berikutnya adalah Provinsi Jatim (Rp366.985 miliar) diikuti Jawa Barat (Rp343.111 miliar). Adapun nilai PDRB terendah terdapat di

Provinsi Gorontalo (Rp3.142 miliar), kemudian diikuti Provinsi Maluku Utara (Rp3.230 miliar). Nilai PDRB pada Tabel 2–Tabel 4 mengesankan bahwa kondisi perekonomian di tingkat regional cukup bervariasi dalam besaran angka sehingga indikasi ketimpangan juga jelas terlihat. Secara umum perekonomian provinsi-provinsi di Jawa memiliki skala atau tingkatan lebih besar dibanding provinsi lain di Luar Jawa. Akan tetapi, pertumbuhan perekonomian di Jawa relatif tidak berbeda jauh dengan provinsi lain di Sumatera, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, maupun Papua.

Tabel 2. Perkembangan PDRB Provinsi di Wilayah Sumatera, 2004–2011

Provinsi	PDRB (Rp Juta)		
	2004	2011**	Laju (%/tahun)
NAD	40.374.282	34.781.000	-3,89
Sumut	83.328.949	126.450.000	5,59
Sumbar	27.578.137	41.277.000	5,50
Riau	75.216.719	102.607.000	4,22
Jambi	11.953.885	18.964.000	5,81
Sumsel	47.344.395	68.012.000	4,72
Bengkulu	5.896.255	8.869.000	5,43
Lampung	28.262.289	40.829.000	4,80
Babel	8.414.980	11.575.000	3,87
Kepri	28.509.063	43.817.000	5,69

Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: **Angka sangat sementara

Tabel 3. Perkembangan PDRB di Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, 2004–2011

Provinsi	PDRB (Rpjuta)		
	2004	2011**	Laju (%/tahun)
DKI	278.524.822	422.162.000	5,46
Jabar	230.003.496	343.111.000	5,34
Jateng	135.789.872	198.226.000	4,99
DIY	16.146.424	22.129.000	4,12
Jatim	242.228.892	366.985.000	5,32
Banten	54.880.407	94.222.000	8,25
Bali	19.963.244	30.754.000	6,01
NTB	14.928.175	19.433.000	4,10
NTT	9.446.770	13.249.000	4,48

Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: **Angka sangat sementara

Tabel 4. Perkembangan PDRB di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, 2004–2011

Provinsi	PDRB (Rp juta)		
	2004	2011**	Laju (%/tahun)
Kalbar	22.483.015,4	32.101.000	4,72
Kalteng	13.253.081,2	20.071.000	5,40
Kalsel	22.057.201,2	32.554.000	5,23
Kaltim	91.050.429,1	115.243.000	2,87
Sulut	12.149.501,3	19.736.000	6,52
Sulteng	10.925.464,7	19.241.000	7,28
Sulse	37.291.394,1	55.116.000	5,00
Sultra	7.480.180,34	12.662.000	6,71
Gorontalo	1.891.763,28	3.142.000	6,65
Sulbar	-	5.238.000	7,29*
Maluku	3.101.995,94	4.507.000	4,75
Malut	2.128.208,25	3.230.000	5,24
Papbar	4.969.210,33	11.915.000	6,14
Papua	16.282.967,6	21.135.000	3,57

Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: *Laju pertumbuhan tahun 2005-2011

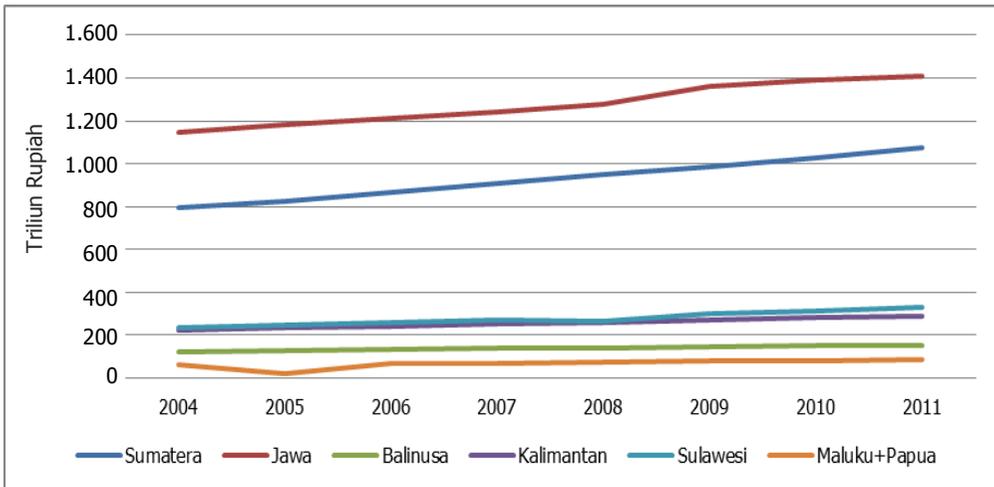
**Angka sangat sementara

PERUBAHAN PDRB PERTANIAN ANTARWILAYAH

Dalam struktur PDB Indonesia, pertanian masih menjadi lapangan usaha utama karena peran sektor tersebut yang strategis. Tidak hanya menjadi sumber produksi pangan dan penyumbang nilai PDB, sektor pertanian juga sebagai penampung tenaga kerja yang besar. Menurut pemikiran teori pembangunan modern, kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDB akan semakin berkurang dengan semakin majunya perekonomian suatu negara atau wilayah (Todaro, 2000), tetapi penurunan kontribusi tersebut akan terkompensasi oleh peningkatan kontribusi peran sektor lain (sekunder atau tersier). Penurunan kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDB seharusnya juga diikuti oleh penurunan peran sebagai penampung tenaga kerja.

Sektor pertanian yang dimaksud dalam hal ini adalah sektor pertanian dalam arti luas, yaitu yang tidak hanya mencakup tanaman bahan pangan, perkebunan, peternakan, dan hasil turunannya, tetapi juga mencakup produk perikanan dan kehutanan (Pusdatin, 2013) yang pengelolaannya di luar tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian. Pertanian dalam arti sempit adalah jika nilai tambah produk perikanan dan kehutanan dikeluarkan dari perhitungan.

Menurut Todaro (2000) terdapat tiga faktor utama yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, yaitu (1) akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan sumber daya manusia; (2) pertumbuhan penduduk, yang nantinya akan mendorong pertumbuhan angkatan kerja; dan (3) kemajuan teknologi.



Sumber: BPS (2014), diolah

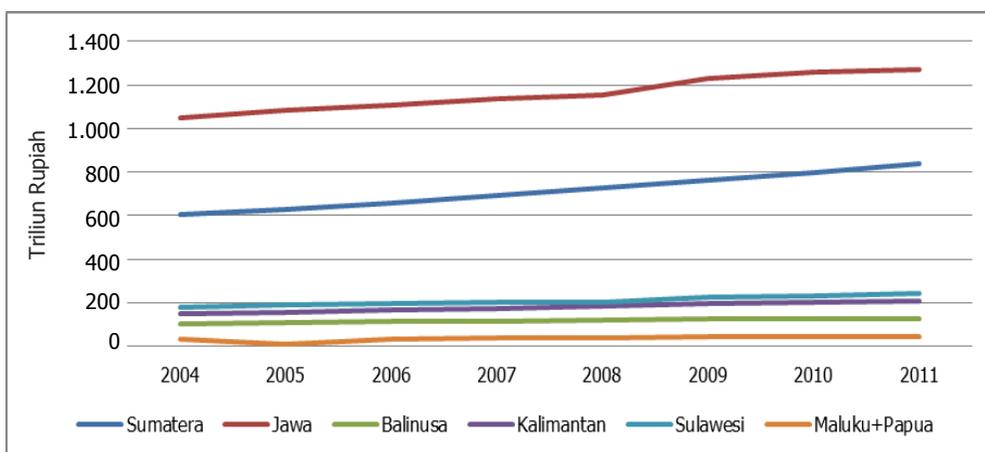
Gambar 16. Perkembangan PDRB Pertanian Arti Luas Menurut Wilayah, 2004–2011

Indikasi ketimpangan juga dapat diamati di tingkat sektoral, khususnya sektor atau lapangan usaha pertanian (pertanian dalam arti luas maupun sempit). Jika dibandingkan antarwilayah tampak bahwa nilai PDRB pertanian di wilayah Jawa lebih besar dibandingkan wilayah luar Jawa selama periode 2004–2011 (Gambar 16 dan Gambar 17). Nilai PDRB pertanian dalam arti luas di Jawa meningkat dari Rp114,7 triliun menjadi Rp140,9 triliun selama kurun 2004–2011, sedangkan PDRB pertanian dalam arti sempit meningkat dari Rp104,9 triliun menjadi Rp127,1 triliun dalam periode yang sama; atau masing-masing meningkat dengan laju 3,1%/tahun dan 3,0%/tahun. Situasi tersebut juga mengindikasikan bahwa sektor pertanian di Jawa memiliki kinerja relatif lebih baik daripada sektor pertanian di tempat lain.

Secara implisit peningkatan PDRB pertanian tersebut juga mengindikasikan bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya (faktor-faktor produksi) untuk pengembangan pertanian dan perekonomian secara umum lebih intensif di Jawa dibandingkan wilayah lain di luar Jawa. Jumlah penduduk Jawa yang besar diduga menjadi salah satu faktor pendorong naiknya kebutuhan dasar kehidupan. Peningkatan kebutuhan dasar tersebut memicu kenaikan permintaan terhadap berbagai produk barang dan jasa. Semakin besarnya tingkat permintaan akhirnya akan mendorong aktivitas produksi dan kegiatan perekonomian secara keseluruhan menjadi lebih intensif.

Telah disebutkan bahwa pemerintah melalui program MP3EI berencana mengalihkan sentra pertumbuhan pertanian dari Jawa ke Sulawesi dan mendorong

pengembangan sektor industri dan jasa di Jawa. Memerhatikan ketersediaan faktor sumber daya dan kinerja sektor pertanian di Jawa serta berbagai kendala yang ada, rencana pengembangan sektor industri dan jasa di Jawa hendaknya tetap dapat memberikan prioritas pada jenis industri dan jasa yang menggunakan output pertanian sebagai bahan/faktor produksi (input industri). Tujuannya agar sektor pertanian yang sudah berkembang di Jawa dapat dipertahankan. Jika pengembangan industri dan jasa dalam program MP3EI tidak disinkronkan dengan upaya pengembangan hasil pertanian, sumber daya pertanian yang sudah tersedia dan atau siap olah dikhawatirkan akan kurang termanfaatkan sehingga akan berdampak pada penurunan kinerja dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB di wilayah Jawa. Sebagaimana analisis Kasryno dan Soeparno (2012), implementasi MP3EI di koridor Jawa dan upaya mengalihkan sentra pertanian ke Sulawesi diperkirakan akan menurunkan kinerja ketahanan pangan nasional.



Sumber: BPS (2014), diolah

Gambar 17. Perkembangan PDRB Pertanian Arti Sempit Menurut Wilayah, 2004–2011

Dari Gambar 16 dan Gambar 17 terlihat jelas bahwa Jawa tidak hanya memiliki nilai PDRB pertanian yang lebih besar tetapi juga kemiringan (*slope*) PDRB yang relatif lebih tajam sehingga mengesankan perkembangan perekonomian Jawa yang lebih progresif dibandingkan wilayah lain di luar Jawa. Apabila sentra pertanian yang sudah mapan ditinggalkan dan beralih ke lokasi lain yang belum berkembang, di samping membuat investasi pertanian yang sudah ada di Jawa menjadi sia-sia, dikhawatirkan juga akan mengganggu kinerja produksi pangan, di tingkat regional maupun nasional, dan juga mengganggu (menurunkan) kesejahteraan petani.

Perkembangan PDRB pertanian selama periode 2004–2011 tidak menunjukkan pola berbeda dari pola umum perkembangan PDRB wilayah (Tabel 5–Tabel 7). Akan tetapi, terdapat indikasi yang menarik bahwa laju perkembangan PDRB pertanian provinsi-provinsi di Jawa cenderung lebih rendah dibandingkan laju perkembangan PDRB pertanian di luar Jawa meskipun pencapaian nominal PDRB pertanian di Jawa tetap lebih besar dibandingkan di luar Jawa. Situasi demikian

diduga tidak lepas dari pengaruh fenomena perlambatan laju produksi (khususnya pangan) yang sudah terjadi cukup lama di Jawa. Wilayah Jawa masih mendominasi produksi subsektor pangan, tetapi dengan laju peningkatan yang semakin rendah. Faktor lain yang diduga turut berpengaruh terhadap perlambatan sektor pertanian adalah laju pertumbuhan ekspor yang rendah (Bank Indonesia, 2013).

Tabel 5. Pertumbuhan PDRB Pertanian Provinsi-Provinsi di Wilayah Sumatera, 2004–2011

Provinsi	Sektor Pertanian Arti Luas (Rp juta)			Sektor Pertanian Arti Sempit (Rp juta)		
	2004	2011**	Laju (%/th)	2004	2011**	Laju (%/th)
NAD	8.068.976	9.350.000	1,20	6.121.251	7.277.000	1,36
Sumut	21.465.423	29.376.000	4,10	18.041.705	24.731.000	4,09
Sumbar	6.937.173	9.415.000	4,56	5.649.917	7.857.000	4,96
Riau	12.464.887	17.354.000	4,80	6.628.956	10.529.000	5,98
Jambi	3.643.691	5.581.000	6,00	3.197.549	5.103.000	6,56
Sumsel	9.261.544	13.132.000	4,91	7.035.474	10.340.000	5,55
Bengkulu	2.344.921	3.283.000	5,22	1.975.348	2.874.000	5,73
Lampung	11.951.916	15.628.000	4,09	10.306.575	13.110.000	3,38
Babel	1.883.821	2.596.000	3,86	1.233.476	1.752.000	3,96
Kepri	1.388.219	1.871.000	4,36	377.277	513.000	3,82

Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: **Angka sangat sementara

Tabel 6. Pertumbuhan PDRB Pertanian Provinsi-Provinsi di Wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, 2004–2011

Provinsi	Sektor Pertanian Arti Luas			Sektor Pertanian Arti Sempit		
	2004	2011**	Laju (%/th)	2004	2011**	Laju (%/th)
DKI	287.574	306.000	1,03	198.583	199.000	0,13
Jabar	34.457.717	42.101.000	3,30	31.921.617	39.552.000	3,59
Jateng	28.606.237	35.422.000	3,29	26.390.791	32.763.000	3,37
DIY	3.052.935	3.555.000	3,35	2.815.790	3.267.000	3,29
Jatim	43.331.493	52.629.000	2,77	39.049.115	45.240.000	1,81
Banten	4.930.267	6.921.000	4,34	4.487.676	6.110.000	3,76
Bali	4.406.176	5.874.000	4,75	3.583.528	4.636.000	3,87
NTB	3.841.308	4.727.000	2,67	3.326.767	4.056.000	2,45
NTT	4.022.907	4.760.000	2,95	3.637.039	4.251.000	2,78

Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: **Angka sangat sementara

Tabel 7. Pertumbuhan PDRB Pertanian Provinsi-Provinsi di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, 2004–2011

Provinsi	Sektor Pertanian Arti Luas			Sektor Pertanian Arti Sempit		
	2004	2011**	Laju (%/th)	2004	2011**	Laju (%/th)
Kalbar	5.715.853	7.911.000	4,66	4.815.838	6.870.000	5,03
Kalteng	5.240.883	6.002.000	1,33	3.538.349	4.561.000	2,99
Kalsel	5.403.507	7.544.000	5,22	4.146.698	5.901.000	5,73
Kaltim	6.153.325	7.619.000	2,39	2.472.029	3.641.000	5,89
Sulut	2.617.084	3.595.000	4,62	1.994.000	2.724.000	4,68
Sulteng	4.972.230	7.529.000	5,38	3.732.595	5.638.000	5,42
Sulsel	12.321.030	14.737.000	2,49	9.622.378	10.896.000	1,87
Sultra	2.798.071	3.669.000	4,68	1.970.087	2.347.000	3,54
Gorontalo	575.307	886.000	6,40	477.413	717.000	6,15
Sulbar	0	2.420.000	17,25	0	2.059.000	16,45*
Maluku	1.058.272	1.378.000	3,29	527.740	660.000	3,14
Malut	759.077	1.093.000	5,31	606.784	897.000	5,72
Papbar	1.540.907	2.044.000	4,21	471.126	711.000	6,16
Papua	2.921.790	3.842.000	3,66	1.658.791	2.351.000	5,39

Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: *Laju pertumbuhan tahun 2005–2011

**Angka sangat sementara

Di wilayah Sumatera, sentra pertanian terdapat terutama di Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung. Baik untuk pertanian dalam arti luas maupun sempit keempat provinsi tersebut konsisten sebagai daerah dengan PDRB pertanian yang relatif "besar" (di atas Rp10.000 miliar pada tahun 2011) dibanding provinsi lain di Sumatera (Tabel 5). Untuk di Jawa, daerah yang merupakan sentra pertanian adalah Provinsi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Di ketiga provinsi ini nilai PDRB pertanian mencapai lebih dari Rp30.000 miliar. Adapun untuk Kawasan Timur Indonesia nilai PDRB yang lebih dari Rp10.000 miliar hanya terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan. Dari ketiga tabel (Tabel 5–Tabel 7) terlihat bahwa pulau Jawa masih berperan sebagai daerah sentra pertanian di Indonesia. Untuk itu, kebijakan pengembangan wilayah yang dicanangkan pemerintah hendaknya tidak mengabaikan dan tetap mengakomodasi peran Jawa tersebut agar kinerja sektor pertanian tidak terganggu.

Pada Tabel 8–Tabel 10 dapat disimak bahwa sebagian besar provinsi memiliki pola perkembangan kontribusi sektor pertanian sesuai teori. Varian atau penyimpangan pola hanya ditemukan di Provinsi NAD, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka-Belitung, Kalimantan Timur, dan Papua. Di ketujuh provinsi tersebut kontribusi (pangsa) sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB dari tahun 2004 menuju tahun 2011 justru meningkat (lebih besar). Padahal, pada periode yang sama, di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan (kecuali

Kalimantan Timur), Sulawesi, Maluku, dan Papua Barat kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB menurun (berkurang).

Pada tahun 2004 kontribusi sektor pertanian dalam arti luas di Jawa berkisar 0,1% (DKI) sampai 21,1% (Jawa Tengah), sedangkan pada tahun 2011 berubah menjadi 0,1% sampai 17,9%, masing-masing untuk provinsi yang sama. Kontribusi yang sangat rendah (seperti di Provinsi DKI) mengindikasikan peran sektor pertanian tidak lagi menjadi andalan wilayah perkotaan ini.

Tabel 8. Pangsa Sektor Pertanian Terhadap PDRB di Wilayah Sumatera, 2004 dan 2011 (%)

Provinsi	Tanaman Pangan		Ternak dan Kebun		Pertanian Arti Luas		Pertanian Arti Sempit	
	2004	2011**	2004	2011**	2004	2011**	2004	2011**
NAD	8,06	11,12	7,10	9,80	19,99	26,88	15,16	20,92
Sumut	9,19	7,43	12,46	12,13	25,76	23,23	21,65	19,56
Sumbar	12,76	11,44	7,73	7,59	25,15	22,81	20,49	19,03
Riau	2,19	1,95	6,62	8,32	16,57	16,91	8,81	10,26
Jambi	11,66	10,59	15,09	16,32	30,48	29,43	26,75	26,91
Sumsel	4,69	4,51	10,17	10,69	19,56	19,31	14,86	15,20
Bengkulu	18,11	16,69	15,39	15,72	39,77	37,02	33,50	32,41
Lampung	21,32	18,38	15,15	13,73	42,29	38,28	36,47	32,11
Babel	2,61	2,88	12,05	12,26	22,39	22,43	14,66	15,14
Kepri	0,27	0,26	1,05	0,91	4,87	4,27	1,32	1,17

Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: **Angka sangat sementara

Tabel 9. Pangsa Sektor Pertanian terhadap PDRB di Wilayah Jawa, Bali, NTB, dan NTT, 2004 dan 2011 (%)

Provinsi	Tanaman Pangan		Ternak dan Kebun		Pertanian Arti Luas		Pertanian Arti Sempit	
	2004	2011**	2004	2011**	2004	2011**	2004	2011**
DKI	0,05	0,03	0,02	0,02	0,10	0,07	0,07	0,05
Jabar	10,80	9,26	3,07	2,27	14,98	12,27	13,88	11,53
Jateng	15,23	12,39	4,21	4,14	21,07	17,87	19,44	16,53
DIY	14,19	11,98	3,25	2,78	18,91	16,06	17,44	14,76
Jatim	10,41	7,84	5,72	4,49	17,89	14,34	16,12	12,33
Banten	5,83	4,10	2,35	2,38	8,98	7,35	8,18	6,48
Bali	11,66	9,34	6,29	5,74	22,07	19,10	17,95	15,07
NTB	15,34	14,58	6,94	6,29	25,73	24,32	22,29	20,87
NTT	22,05	17,40	16,45	14,69	42,58	35,93	38,50	32,09

Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: **Angka sangat sementara

Tabel 10. Pangsa Sektor Pertanian terhadap PDRB di Wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua, 2004 dan 2011 (%)

Provinsi	Tanaman Pangan		Ternak dan Kebun		Pertanian Luas		Pertanian Sempit	
	2004	2011**	2004	2011**	2004	2011**	2004	2011**
Kalbar	9,83	9,84	11,59	11,56	25,42	24,64	21,42	21,40
Kalteng	7,53	4,41	19,17	18,31	39,54	29,90	26,70	22,72
Kalsel	10,97	10,37	7,83	7,75	24,50	23,17	18,80	18,13
Kaltim	1,23	1,23	1,48	1,93	6,76	6,61	2,72	3,16
Sulut	6,36	5,61	10,06	8,19	21,54	18,22	16,41	13,80
Sulteng	14,61	11,96	19,56	17,34	45,51	39,13	34,16	29,30
Sulsel	15,09	12,91	10,71	6,86	33,04	26,74	25,80	19,77
Sultra	7,95	5,62	18,39	12,91	37,41	28,98	26,34	18,54
Gorontalo	13,76	13,49	11,47	9,33	30,41	28,20	25,24	22,82
Sulbar	-	16,25	-	23,06	-	46,20	-	39,31
Maluku	8,76	7,23	8,25	7,41	34,12	30,57	17,01	14,64
Malut	9,46	8,76	19,05	19,01	35,67	33,84	28,51	27,77
Papbar	5,11	3,04	4,37	2,93	31,01	17,15	9,48	5,97
Papua	8,43	8,82	1,76	2,30	17,94	18,18	10,19	11,12

Sumber: BPS (2014), diolah

Keterangan: **Angka sangat sementara

Jika subsektor perikanan dan kehutanan tidak diperhitungkan (sektor pertanian dalam arti sempit), terlihat bahwa kontribusi pertanian terhadap PDB (PDRB) menjadi lebih rendah lagi. Pada tahun 2004 berkisar 0,1% (DKI) sampai 19,4% (Jawa Tengah), sedangkan pada tahun 2011 menjadi 0,1% dan 16,5% untuk provinsi yang sama. Di Jawa Barat dan Jawa Timur yang memiliki nilai PDRB lebih tinggi dari Provinsi Jawa Tengah ternyata kontribusi sektor pertaniannya lebih rendah dibanding Jawa Tengah (Tabel 9). Pada tahun 2004 dan 2011 pangsa sektor pertanian di kedua provinsi masing masing hanya 13,9% dan 11,5% (Jawa Barat) serta 17,4% dan 14,8% (Jawa Timur).

Di wilayah Sumatera, kontribusi sektor pertanian secara luas pada tahun 2004 berkisar 4,9% (Kepulauan Riau) sampai 42,3% (Lampung). Pada tahun 2011, besaran kontribusi berubah menjadi 4,3% (Kepulauan Riau) sampai 38,3% (Lampung). Dari Tabel 8 terkesan bahwa di wilayah Lampung, dan Bengkulu sektor pertanian memiliki peran lebih dominan terhadap perekonomian wilayah dibandingkan di tempat lain. Kecenderungan seperti itu tidak berubah meskipun perkebunan dan perikanan dikeluarkan dari perhitungan.

Di wilayah Kalimantan peran sektor pertanian dalam perekonomian masih relatif dominan, kecuali di Provinsi Kalimantan Timur (Tabel 10). Di Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB tahun 2004 bervariasi 24,5% sampai 39,5%. Adapun pada

tahun 2011 nilai kontribusi bervariasi 23,2% sampai 29,9%. Bila dalam arti sempit kisaran kontribusi pertanian berkurang menjadi 18,8% sampai 26,7% pada tahun 2004 dan pada tahun 2011 kisaran kontribusi berkurang menjadi 18,3% sampai 22,7%.

Sektor pertanian di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua Barat juga masih berperan strategis dalam perekonomian masyarakat. Pada tahun 2004 kontribusi sektor pertanian umumnya mencapai lebih dari 30,0%. Hanya di Provinsi Sulawesi Utara yang kontribusi sektor pertanian kurang dari 30,0%. Pada tahun 2011 besaran kontribusi sektor pertanian di beberapa provinsi di wilayah tersebut mengalami penurunan sehingga yang bertahan di atas 30,0% hanya di Sulawesi Tengah, Maluku, dan Maluku Utara. Kontribusi sektor pertanian di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 46,2% di tahun 2011. Akan tetapi, angka ini tidak dapat dibandingkan karena pada saat tahun 2004 data kontribusi belum tersedia.

Sektor pertanian secara internal terdiri atas beberapa subsektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan. Akan tetapi, pada data yang digunakan untuk analisis ini, subsektor tanaman pangan digabungkan dengan subsektor hortikultura. Demikian pula data subsektor peternakan digabung dengan subsektor perkebunan sehingga sektor pertanian hanya terbagi atas subsektor tanaman pangan dan subsektor peternakan dan perkebunan. Tabel 8–Tabel 10 menunjukkan bahwa wilayah yang kontribusi tanamannya lebih tinggi dari kontribusi peternakan dan perkebunan meliputi Provinsi NAD, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, seluruh Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Maluku, dan Papua. Sebaliknya, wilayah di mana kontribusi peternakan dan perkebunan lebih tinggi dibandingkan kontribusi tanaman pangan adalah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Papua Barat.

KESIMPULAN

Selama periode 2004–2013 nilai PDB nasional atas harga berlaku naik sebesar 3,96 kali lipat. Namun, PDB atas harga konstan tahun 2000 dalam periode yang sama hanya naik sebesar 1,67 kali lipat. Hal ini mengindikasikan bahwa angka inflasi nilai rupiah selama periode ini cukup besar, sehingga daya beli masyarakat secara riil sebenarnya tidak naik sebesar pertumbuhan PDB atas harga berlaku.

Pada tahun 2004, sektor pertanian dalam arti luas menyumbang sekitar 14% dari total PDB nasional. Selama periode 2004–2013 peran sektor pertanian terhadap PDB nasional tidak mengalami perubahan yang nyata, sehingga sumbangan sektor ini pada tahun 2013 masih tetap, yaitu 14%.

Sumbangan sektor pertanian dalam arti sempit (subsektor tanaman pangan, perkebunan, dan peternakan) terhadap PDB cenderung menurun dari 12,24% pada tahun 2000 menjadi 10,59% pada tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa telah

terjadi transformasi ekonomi nasional dari sektor pertanian dalam arti sempit sebagai sumber pendapatan nasional, menuju ke dominasi sektor nonpertanian sebagai sumber pendapatan.

Dibanding dengan subsektor tanaman bahan pangan dan subsektor tanaman perkebunan, pertumbuhan dari kuartal ke kuartal untuk subsektor peternakan menunjukkan pola yang relatif stabil. Hal ini menunjukkan relatif kuatnya daya tahan subsektor peternakan terhadap gejolak ekonomi nasional.

Pendapatan nasional per kapita selama periode 2003–2013 naik cukup signifikan, baik pendapatan per kapita menurut harga yang berlaku, maupun pendapatan berdasarkan harga konstan tahun 2000. Akan tetapi, pertumbuhan pendapatan tersebut cenderung melambat pada periode 2009–2013.

Data BPS menunjukkan bahwa nilai indeks Gini untuk pendapatan per kapita yang semakin besar, khususnya selama periode 2009–2013. Hal ini menunjukkan semakin senjangnya distribusi pendapatan di Indonesia dari waktu ke waktu. Kesenjangan ekonomi juga terjadi antarwilayah. Pada tahun 2013 indeks Gini terkecil terdapat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan indeks Gini terbesar terdapat di Provinsi Papua.

Selama periode 2004–2011 pertumbuhan PDRB di Jawa relatif lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDRB di luar Jawa. Hal ini menunjukkan adanya akumulasi nilai ekonomi nasional di provinsi-provinsi di Jawa.

Nilai PDRB pertanian di wilayah Jawa relatif lebih besar dibandingkan wilayah luar Jawa. Situasi tersebut juga mengindikasikan bahwa pembangunan sektor pertanian di Jawa relatif lebih maju dibandingkan dengan sektor pertanian di luar Jawa.

Sumbangan sektor pertanian terhadap PDB cenderung turun mengindikasikan terjadinya transformasi ekonomi dari sektor pertanian ke sektor lain di luar pertanian. Terkait dengan kecenderungan tersebut rumah tangga tani di perdesaan perlu dipersiapkan agar mereka mempunyai kemampuan untuk menganekaragamkan sumber pendapatan rumah tangga dengan mengembangkan kegiatan usaha lain yang lebih produktif.

Di samping itu, menurunnya sumbangan sektor pertanian terhadap pendapatan nasional perlu diimbangi dengan kebijakan untuk memberikan insentif bagi pengembangan sektor nonpertanian, seperti industri pengolahan hasil pertanian dan industri perdesaan, yang diharapkan dapat menyerap kelebihan tenaga kerja di sektor pertanian. Pemerintah perlu mempercepat dan memperluas pembangunan sarana dan prasarana pertanian di kawasan timur Indonesia, serta mempercepat konektivitas antarwilayah di Indonesia untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi pada umumnya dan pembangunan sektor pertanian pada khususnya. Demikian pula pemerintah perlu mempercepat pelaksanaan program reforma agraria untuk meningkatkan akses petani terhadap sumber daya lahan dan mengatasi meningkatnya kesenjangan pendapatan petani di perdesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014. Tabel Dinamis. Badan Pusat Statistik. Jakarta. <http://www.bps.go.id> (4 Oktober 2014).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015a. Berita Resmi Statistik. No. 45/04/Th. XVIII, 5 Mei 2015. Badan Pusat Statistik. Jakarta. <http://www.bps.go.id> (14 September 2015).
- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2015b. Data Sosial dan Kependudukan. Badan Pusat Statistik. Jakarta. <http://www.bps.go.id> (14 September 2015).
- Firdaus, M. 2013. Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah di Indonesia: Fakta dan Strategi Inisiatif. Orasi Ilmiah Guru Besar IPB. PT Penerbit IPB Press. Bogor.
- Kasryno, F. dan H. Soeparno. 2012. Pelaksanaan MP3EI Koridor Jawa akan Menyebabkan Ketahanan Pangan Nasional Semakin Parah. *Dalam* E.E. Ananto, S. Pasaribu, M. Ariani, B. Sayaka, N.S. Saad, K. Suradisastra, K. Subagyono, H. Soeparno, F. Kasryno, E. Pasandaran, dan R. Hermawanto (Eds.). *Kemandirian Pangan Indonesia dalam Perspektif Kebijakan MP3EI*. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Jakarta. hlm. 16–58.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2010. Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011–2025. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jakarta.
- Kusumawardhani, N.M.S., I.G.A.M. Sriandi, dan M. Susilawati. 2012. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PDB Indonesia dengan Persamaan Simultan 2SLS. *e-Jurnal Matematika* 1(1):99–102.
- [Pusdatin] Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. 2013. Analisis PDB Sektor Pertanian Tahun 2013. Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian. Jakarta.
- Bank Indonesia. 2013. Laporan Perekonomian Indonesia 2012. Bank Indonesia. Jakarta. <http://www.bi.go.id> (2 Agustus 2014)
- Raz, A.F., T.P.K. Indra, D.K. Artikasih, dan S. Citra. 2012. Krisis Keuangan Global dan Pertumbuhan Ekonomi: Analisis dari Perekonomian Asia Timur. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Oktober 2012:37–56.
- Sihono, T. 2009. Dampak Krisis Finansial Amerika Serikat terhadap Perekonomian Asia. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan* 6(1):1–20.
- Silvia, E.D., Y. Wardi, dan H. Aimon. 2013. Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, dan Inflasi di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi* 1(2):224–243.
- Todaro, M.P. 2000. *Economics Development*. 7th edn. Addison Wesley Longman, Inc. Boston.